



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 17 Juni 2019

Halaman: 5

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CERMIN</p> <p style="text-align: center;">Lagi-lagi Soal Parkir</p>  <p>MEMBERANTAS parkir liar di Yogya mungkin? Jawabnya mungkin, kalau petugas bertindak tegas dan tak hanya temporer atau isitilahnya ehangat-hangat tahi ayam. Sebab, pelanggaran parkir sangat kasat mata. Kita memaklumi keterbatasan jumlah petugas acap membuat penanganan terhadap pelanggaran parkir tidak maksimal.</p> <p>Pelanggaran paling umum adalah penarikan tarif parkir di atas harga resmi dan penggunaan lahan larangan parkir. Dishub mencatat, selama Lebaran ini pelanggaran tarif parkir menurun. Meski begitu, bukan berarti tidak ada pelanggaran. Pelanggaran tetap terjadi walaupun intensitasnya kecil. Hanya terkadang konsumen tak mau repot melapor ke pihak terkait dan hanya diam. Bahkan, ketika ditarik tarif di atas harga resmi, konsumen terkadang hanya nurut karena tak mau ribut. Konsumen hanya nggrundel dan bersungut-sungut.</p> <p>Padahal, untuk menegakkan aturan, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak atas pelayanan yang baik dan membayar sesuai harga yang ditetapkan. Bila kedua hal tersebut tak terpenuhi, wajar bila masyarakat protes dan menuntut haknya. Untuk itulah ia seharusnya mengadu ke institusi yang berwenang, dalam hal ini Dishub. Berdasarkan catatan Dishub Kota Yogya, pada Lebaran tahun ini setidaknya ada 30 aduan dan masyarakat terkait pelanggaran parkir.</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pengaduan umumnya terkait dengan pemanfaatan lahan yang bukan untuk tempat parkir, serta pelanggaran pemungutan tarif di luar tarif resmi. Dishub harus cepat merespons aduan tersebut. Sebab, bila tidak, selain bisa mengurangi kredibilitas penegak hukum, juga dikhawatirkan pelanggaran jadi membudaya. Kalau ini sampai terjadi, sungguh berbahaya dan orang tak percaya lagi pada hukum.</p> <p>Pelanggaran parkir, entah itu menyangkut lahan maupun tarif, sepertinya menjadi masalah klasik yang dari dulu sudah ada. Pelugas juga bukan tidak tahu, bahkan ada kesan pembiaran, pura-pura tidak tahu dan sebagainya. Kini, masyarakat makin kritis dan berharap ada perbaikan dalam pelayanan parkir karena mereka telah mengeluarkan uang untuk jasa tersebut.</p> <p>Karena itu, sudah saatnya aparat bertindak lebih tegas. Mereka yang sudah berulang kali melakukan kecurangan (baca: pungli) patut untuk diproses hingga pengadilan. Namun, untuk tahap awal, lebih baik menggunakan pendekatan persuasif. Sebab, boleh jadi, tidak ada niat jahat atas perbuatan mereka. (Hudono)-a</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nilai Berita</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Sifat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Netral</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Amat Segera</td> </tr> </table>	Nilai Berita	Sifat	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera
Nilai Berita	Sifat				
<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera				

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005